

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Publik terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2005-2024

Almausshofi ^{1*}, Ira Novika ², Septiana Dwi Nurmala ³, Neli Aida ⁴, Muhammad Mufti Hudani ⁵, Qurrota Ayu Nindien ⁶

^{1, 2, 3, 4, 5, 6} Universitas Lampung, Indonesia

* almashf93@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi untuk mengkaji pengaruh pengeluaran pemerintah sektor publik terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, khususnya dalam konteks ketimpangan antar wilayah dan efektivitas kebijakan fiskal. Ketimpangan distribusi sumber daya dan masih tingginya angka kemiskinan di beberapa daerah menunjukkan perlunya evaluasi dan optimalisasi strategi alokasi anggaran oleh pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara empiris dampak pengeluaran sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia dalam rentang waktu 2005 hingga 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain analisis time series berbasis data sekunder. Teknik analisis dimulai dengan uji deskriptif untuk memahami karakteristik data, dilanjutkan dengan uji asumsi klasik seperti uji normalitas (Jarque-Bera), multikolinearitas (VIF), autokorelasi (Breusch-Godfrey LM Test), dan heteroskedastisitas (White Test). Analisis utama dilakukan dengan regresi linear berganda menggunakan model $Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 X_{2t} + \beta_3 X_{3t} + \epsilon_t$, di mana Y adalah persentase penduduk miskin, X_1 adalah pengeluaran infrastruktur, X_2 adalah pengeluaran pendidikan, dan X_3 adalah pengeluaran kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran infrastruktur dan pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, masing-masing sebesar -1,90% dan -3,66% untuk setiap peningkatan 1%. Sebaliknya, pengeluaran kesehatan justru menunjukkan pengaruh positif signifikan sebesar 0,66%. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan (F-stat: 141,328; p-value: 0,000) dengan nilai Adjusted R^2 sebesar 0,956. Temuan ini menegaskan pentingnya optimalisasi belanja pemerintah pada sektor infrastruktur dan pendidikan, serta perlunya evaluasi efektivitas pengeluaran sektor kesehatan dalam rangka pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

Keywords: *Pengeluaran Pemerintah; Sektor Publik; Kemiskinan; Kebijakan Fiskal*

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan salah satu bahan diskusi yang tidak akan pernah selesai untuk didiskusikan terutama di negara Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang masih terus bergelut untuk menghadapi tantangan kemiskinan. Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu untuk memenuhi segala kebutuhannya (Alam et al., 2023). Adanya kemiskinan merupakan akibat ketidakmampuan penduduk dalam mempertahankan kehidupan yang layak secara sosial (Arifin, 2020). Ketidakmampuan dan kekurangan yang dihadapi oleh individu dalam menjalankan kehidupan secara normal (Rizal & Purnairawan, 2024). Upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab utama pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah menjalankan

berbagai program ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat, salah satunya dengan menciptakan lapangan pekerjaan (Aminah, 2016). Keberhasilan pembangunan nasional sering kali diukur melalui penurunan tingkat kemiskinan, karena kemiskinan menjadi salah satu indikator utama dalam menilai tingkat kesejahteraan suatu negara (Komang & Sudemen, 2025). Upaya yang dilakukan mengurangi kesenjangan pendapatan, kebijakan pembangunan di setiap negara bertujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang memiliki banyak sisi dalam pembangunan karena penanggulangannya melibatkan masalah yang terkait dengan politik, nilai, dan preferensi di samping masalah tentang penyebab dan dampak kemiskinan (Pratama & Utama, 2019).

Kemiskinan bukan hanya masalah rendahnya pendapatan, tetapi juga terkait dengan terbatasnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas (Farida & Widodo, 2024). Pemerintah Indonesia telah menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan, karena investasi pada kedua sektor ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pada akhirnya mengurangi tingkat kemiskinan (Palanewen et al., 2018). Kemiskinan sendiri merupakan kondisi multidimensi yang ditandai dengan ketidakmampuan individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan adalah kondisi hilangnya kesejahteraan (Simarmata & Iskandar, 2022). Kondisi ini erat kaitannya dengan rendahnya pendapatan, tempat tinggal yang tidak layak, terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta tingginya angka pengangguran (Khairunnisa et al., 2021). Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan menuntut intervensi komprehensif dari berbagai sektor, tidak hanya dalam aspek ekonomi semata. Kurangnya akses terhadap kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan air bersih merupakan definisi kemiskinan. Kurangnya akses terhadap pekerjaan dan pendidikan juga dapat menjadi tanda kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah di seluruh dunia (Safitri et al., 2021).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), dalam dua dekade terakhir terdapat tren penurunan persentase penduduk miskin di Indonesia. Misalnya, pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 26,3 juta jiwa atau sekitar 9,57% dari total populasi, menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian, kemiskinan masih menjadi isu yang belum sepenuhnya terselesaikan. Seiring dengan teknologi dan komunikasi, masyarakat harus lebih terbuka akan kemajuan yang ada agar tertinggal (Saputri et al., 2025). Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebanyak 25,90 juta jiwa dengan jumlah presentase penduduk miskin di kota adalah 7,29% dan presentase penduduk miskin di desa adalah 12,22% (Andina & Wahyudi, 2024). Pemerintah telah meluncurkan berbagai program pengentasan kemiskinan melalui peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Di antara berbagai instrumen yang digunakan, pengeluaran pemerintah sektor publik memiliki peranan penting dalam menekan angka kemiskinan (Fithri & Kaluge, 2017).

Kajian mengenai keterkaitan antara pengeluaran pemerintah dan kemiskinan menjadi penting untuk dilakukan, terutama untuk melihat apakah belanja negara di sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan mampu secara signifikan menurunkan angka kemiskinan dalam jangka panjang. Karena secara umum, ketiga sektor ini merupakan prioritas utama dalam struktur anggaran pemerintah dan menjadi fondasi pembangunan sosial-ekonomi.

Kemiskinan dapat diatasi dengan adanya upaya intervensi dari kebijakan pemerintahan. Salah satu kebijakan pemerintah daerah yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan fiskal yang dilaksanakan melalui belanja pemerintah (Mahendra, 2020). Kemampuan masyarakat miskin untuk mengakses layanan penting untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti kesehatan dan pendidikan, merupakan isu utama dalam penanggulangan kemiskinan. Di sinilah belanja pemerintah berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya mempermudah masyarakat miskin untuk mengakses layanan publik. Melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah secara tidak langsung akan lebih banyak mengurangi kemiskinan (Rachman, 2024).

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada analisis jangka panjang pengaruh pengeluaran pemerintah sektor publik terhadap kemiskinan di Indonesia selama periode 2005–2024, yang mencakup masa sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Penelitian ini juga menyoroti efektivitas belanja pemerintah pada sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dalam menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan.

Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif mencakup analisis hubungan antara pengeluaran pemerintah dalam sektor publik, khususnya pada infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, terhadap kemiskinan di Indonesia. Variabel terikat yaitu tingkat kemiskinan di Indonesia dalam rentang waktu dari tahun 2005 sampai 2024. Ukuran kemiskinan ditentukan dalam bentuk persentase populasi yang berada di bawah batas kemiskinan berdasarkan informasi yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Variabel yang mempengaruhi terdiri dari tiga elemen utama pengeluaran pemerintah: Anggaran Pemerintah untuk Infrastruktur (X1), Anggaran Pemerintah untuk Pendidikan (X2), dan Anggaran Pemerintah untuk Kesehatan (X3). Data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk deret waktu yang meliputi periode antara tahun 2005 dan 2024. Informasi dikumpulkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk data mengenai kemiskinan serta pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan, dan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk data pengeluaran pemerintah di sektor infrastruktur.

Model Regresi

Penelitian ini menggunakan analisis Regresi Linear Berganda, yaitu hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel bebas ($X_1, X_2, \dots, X_n$) dengan variabel terikat (Y). Untuk menganalisis hubungan antar variabel, digunakan pendekatan Regresi Linear Berganda dengan model:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 X_{2t} + \beta_3 X_{3t} + \varepsilon_t$$

Keterangan:

Y_t : Persentase penduduk miskin pada tahun ke- t

β_0 : Konstanta atau intercept

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen

X_{1t} : Pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur pada tahun ke- t

X_{2t} : Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan pada tahun ke- t

X_{3t} : Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan pada tahun ke- t

ε_t : Error term (gangguan/error residual)

Pengujian Asumsi Klasik

Tujuan Pengujian asumsi klasik ini adalah untuk mengetahui apakah model estimasi yang telah dibuat bertentangan dengan asumsi-asumsi klasik tersebut. Oleh karena itu, kita melakukan pengujian seperti Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi, dan Uji Heteroskedastisitas.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan hasil analisis data. Keputusan dari pengujian ini berasal dari penentuan H_0 dan H_a . Oleh karena itu, kita melakukan pengujian seperti Uji t-statistik (Uji Parsial), Uji F-statistik, dan Uji R-Squared (Koefisien Determinasi).

Hasil

Hasil Regresi

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel dependen, yaitu kemiskinan, dipengaruhi oleh tiga variabel independen: pengeluaran infrastruktur, pengeluaran pendidikan, dan pengeluaran kesehatan. Nilai koefisien untuk pengeluaran infrastruktur adalah -1,901658, yang berarti setiap peningkatan 1% dalam pengeluaran infrastruktur akan mengurangi kemiskinan sebesar 1,9%. Sementara itu, pengeluaran pendidikan memiliki koefisien -3,660512, yang menunjukkan bahwa peningkatan 1% dalam pengeluaran pendidikan akan menurunkan kemiskinan sebesar 3,6%. Namun, pengeluaran kesehatan menunjukkan koefisien positif sebesar 0,657895, yang berarti peningkatan 1% dalam pengeluaran kesehatan akan meningkatkan kemiskinan sebesar 0,6%.

Tabel 1. Hasil Regresi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
	70.81060	3.154953	22.44427	0.0000
C	-1.901658	0.289107	-6.577694	0.0000
Infrastruktur Pendidikan Kesehatan	-3.660512	0.396200	-9.239045	0.0000
	0.657895	0.274984	2.392485	0.0294
R-squared	0.963635	Mena dependent var		11.92850
Adjusted R-Squared	0.956817	S.D dependent var		2.689152
S.E of Regression	0.560692	Akaike info criterion		1.857566
Sum Squared Resid	5.030004	Schwarz criterion		2.056712
Log Likelihood	-14.57566	Hannan-Quinn criter		1.896441
F-Statistic	141.3284	Durbin-Waston stat		1.207182
Prob(F-Statistic)	0.000000			

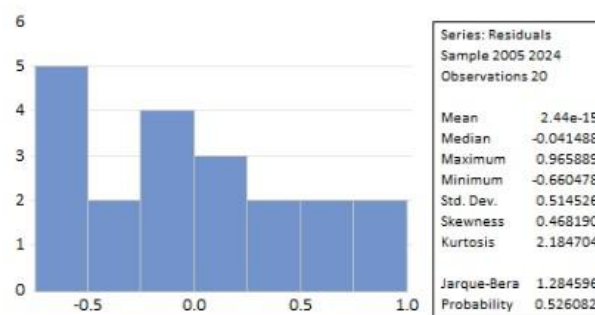
Hasil tabel 1 menunjukkan *Included observations* = 20, artinya jumlah sampel atau observasi sebanyak 20 sampel. *Standart Error of Regression*, dikatakan model regresi baik untuk dijadikan model peramalan apabila *S.E. of regression* < *S.D. dependent var* (Y).

Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan analisis regresi, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: $Y_i = 70,81060 - 1,901658X_1 - 3,660512X_2 + 0,657895X_3$. Konstanta 70,81% menunjukkan bahwa jika tidak ada pengeluaran infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, kemiskinan akan berada pada level tersebut. Dengan demikian, pengeluaran infrastruktur dan pendidikan berkontribusi positif dalam mengurangi kemiskinan, sedangkan pengeluaran kesehatan berkontribusi negatif.

Uji Asumsi Klasik

Uji untuk normalitas mengungkapkan bahwa data memiliki distribusi normal dengan nilai probabilitas 0,526082, yang melebihi 0,05, sehingga asumsi normalitas tidak menjadi kendala. Uji multikolinearitas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) di bawah angka 10, yang menunjukkan tidak adanya indikasi multikolinearitas. Uji untuk autokorelasi juga menunjukkan bahwa asumsi mengenai tidak adanya autokorelasi telah terpenuhi dengan nilai probabilitas 0,2328, yang lebih besar dari 0,05.



Gambar 1. Uji Normalitas

Berdasarkan hasil gambar 1 uji normalitas tersebut didapatkan nilai probabilitas sebesar 0,526082 ($>0,05$) maka data tersebut terdistribusi normal dan tidak ada masalah.

Tabel 2. Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Varriance	Uncentered VIF	Centered VIF
	9.953728	633.2386	NA
C	0.083583	792.0837	2.457722
Infrastruktur Pendidikan Kesehatan	0.156975	1351.475	3.060546
	0.075616	521.7543	3.791848

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas didapatkan nilai VIF ($< 10,00$) maka berkesimpulan data tidak terjadi gejala multikolinearitas atau asumsi uji multikolinearitas sudah terpenuhi.

Tabel 3. Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test :			
Null hypothesis : No serial Correlation at up to 2 lags			
F-statistic	1.194548	Prob, F(2,14)	0.3319
Obs*R-suared	2.915469	Prob, Chi-Square (2)	0.2328

Hasil tabel 3 menunjukkan uji autokorelasi tersebut didapatkan nilai Probability Obs*R-Squared sebesar 0,2328 ($> 0,05$) maka bisa disimpulkan bahwa asumsi uji autokorelasi sudah terpenuhi atau data sudah lolos uji autokorelasi.

Table 4. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test White			
Null hypothesis : Homoskedasticity			
F-statistic	4.480418	Prob, F(9,110)	0.0141
Obs*R-suared	16.02573	Prob, Chi-Square (9)	0.0663
Scaled explained SS	6.075438	Prob, Chi-Square (9)	0.7323

Hasil dari tabel 4 merupakan uji heteroskedastisitas tersebut didapatkan nilai Probability Obs*R-Squared sebesar 0,0663 ($> 0,05$) maka bisa disimpulkan bahwa asumsi uji heteroskedastisitas sudah terpenuhi atau data sudah lolos uji heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Hasil dari uji t menunjukkan bahwa pengeluaran untuk infrastruktur (X1) memiliki t-Statistic yang bernilai -6,577 dan probabilitas 0,000, yang mengindikasikan adanya pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Pengeluaran pendidikan (X2) juga menunjukkan hasil yang signifikan dengan t-Statistic -9,239 dan probabilitas 0,000. Sementara itu, pengeluaran kesehatan (X3) memiliki t-Statistic 2,392 dan probabilitas 0,029, yang juga menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Uji F memberikan hasil dengan F-Statistic sebesar 141,328 dan probabilitas 0,000, yang menandakan bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan secara bersamaan terhadap variabel dependen. Di samping itu, nilai *Adjusted R-squared* yang mencapai 0,956 menunjukkan bahwa 95,6% variasi dalam tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh pengeluaran pemerintah di bidang publik.

Pembahasan

Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merujuk pada alokasi dana oleh negara untuk memenuhi kebutuhan publik, baik melalui belanja langsung maupun tidak langsung, guna menunjang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sejalan dengan temuan sebelumnya yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah diarahkan untuk memperkuat kapasitas ekonomi dan sosial melalui pembiayaan pembangunan, infrastruktur, pendidikan, dan sektor-sektor strategis lainnya (Azmi & Panjawa, 2022). Pemerintah cenderung meningkatkan pajak untuk membiayai pengeluarannya, namun masyarakat memiliki keterbatasan toleransi dalam membayar pajak yang terus meningkat. Kondisi ini dapat memicu efek pengalihan (*displacement effect*), yaitu situasi ketidakstabilan sosial yang menyebabkan aktivitas swasta beralih menjadi tanggung jawab pemerintah.

Infrastruktur

Infrastruktur merupakan salah satu fondasi penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Tingkat ketersediaan dan kualitas infrastruktur memiliki pengaruh besar terhadap percepatan pembangunan, baik secara nasional maupun regional. Sejalan dengan temuan yang mengungkapkan bahwa infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, energi, dan fasilitas sanitasi berfungsi sebagai pendukung utama dalam kegiatan ekonomi, serta memperluas akses masyarakat terhadap pasar, pendidikan, dan layanan kesehatan (Wahyuningrum & Juliprijanto, 2022). Infrastruktur memengaruhi produktivitas marginal modal swasta (*marginal productivity of private capital*), sedangkan secara mikro, infrastruktur yang memadai mampu menekan biaya produksi dan distribusi, yang pada gilirannya menciptakan efisiensi ekonomi dan peluang kerja, terutama bagi masyarakat miskin.

Pendidikan

Pendidikan memainkan peran kunci dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Individu yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki akses terhadap pekerjaan yang lebih baik dan berpendapatan lebih tinggi. Hal ini didukung oleh temuan yang menjelaskan bahwa investasi pendidikan oleh pemerintah membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk menunjukkan hasil yang nyata (Sidabutar et al., 2020). Dalam penelitian mereka, pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan terbukti berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, namun diperlukan komitmen kebijakan jangka panjang agar

program-program pendidikan dapat mencapai tujuan diharapkan dalam mengatasi masalah sosial ekonomi. Peningkatan anggaran pemerintah dalam sektor pendidikan mencerminkan investasi jangka panjang untuk membangun generasi yang lebih terdidik dan produktif. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif.

Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan

Kesehatan merupakan komponen penting dalam pembangunan manusia. Pemerintah berperan dalam menyediakan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas melalui pembiayaan publik di sektor ini. Pelayanan kesehatan yang baik berdampak langsung pada produktivitas masyarakat, khususnya kelompok miskin, karena kesehatan yang buruk sering kali menjadi penghambat utama dalam mencari nafkah atau bekerja secara optimal. Melalui adanya peningkatan pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan, diharapkan masyarakat memiliki kondisi fisik yang lebih baik untuk bekerja, berkontribusi dalam kegiatan ekonomi, dan keluar dari perangkap kemiskinan struktural. Oleh karena itu, pengeluaran di bidang ini dianggap sebagai bentuk investasi dalam kapasitas produksi masyarakat.

Kemiskinan

Kemiskinan didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar yang layak, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Sejalan dengan ini, terdapat penelitian yang menyebutkan bahwa kemiskinan bukan hanya tentang rendahnya pendapatan, tetapi juga mencakup keterbatasan dalam akses terhadap sumber daya, layanan dasar, dan partisipasi sosial (Sirait et al., 2022).

Infrastruktur terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil analisis regresi, pengeluaran pemerintah pada sektor infrastruktur memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia selama periode 2005-2024. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar -1,901658, yang berarti bahwa setiap kenaikan pengeluaran infrastruktur sebesar 1% akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 1,90%. Selain itu, nilai t-statistik sebesar -6,577 dengan nilai probabilitas 0,000 ($< 0,05$) menunjukkan bahwa pengaruh tersebut signifikan secara statistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran dalam infrastruktur merupakan salah satu alat kebijakan fiskal yang berhasil dalam mengurangi angka kemiskinan.

Infrastruktur yang memadai, seperti jalan, jembatan, pasokan listrik, dan sistem transportasi, dapat memperbaiki hubungan antar wilayah, menekan biaya logistik, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta memberikan akses kepada masyarakat yang kurang mampu terhadap pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Dengan cara ini, pengeluaran di sektor infrastruktur turut meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat. Penemuan ini konsisten dengan pemikiran yang mengemukakan bahwa kehadiran infrastruktur merupakan prasyarat penting dalam memperluas pertumbuhan ekonomi dan menciptakan keadilan ekonomi (Ningrum et al., 2020). Infrastruktur berfungsi sebagai "penggerak" pertumbuhan karena dampaknya terhadap efisiensi dalam produksi dan pergerakan tenaga kerja. Lebih lanjut, penelitian internasional di Sub-Sahara Afrika, mengungkapkan bahwa infrastruktur (transportasi, listrik, ICT, air dan sanitasi) secara signifikan mengurangi tingkat kemiskinan di Sub-Sahara Afrika dengan hasil konsisten baik untuk indeks komposit maupun per kategori infrastruktur (Mallek et al., 2024).

Pendidikan terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil analisis regresi, variabel pengeluaran Pendidikan menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia selama periode 2005-2024. Nilai koefisien regresi sebesar -3,660512 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan pengeluaran pendidikan sebesar 1% akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 3,66%. Selain itu, nilai t-statistik sebesar -9,239 dan probabilitas sebesar 0,000 ($< 0,05$) menguatkan bahwa pengaruh tersebut sangat signifikan secara statistik. Ini menandakan bahwa Pendidikan memiliki peran paling kuat di antara ketiga sektor yang diteliti (infrastruktur, Pendidikan, dan kesehatan) dalam mengentaskan kemiskinan. Secara rasional, hal ini bisa dipahami karena pendidikan memperbaiki mutu sumber daya manusia melalui pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas kerja. Individu dalam masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dan bergaji stabil, sehingga dapat keluar dari keadaan miskin. Akses yang lebih baik terhadap pendidikan juga menciptakan peluang untuk pergerakan sosial antar generasi. Temuan ini diperkuat oleh penelitian yang menyatakan bahwa pengeluaran untuk pendidikan memberikan dampak tidak hanya secara langsung, tetapi juga tidak langsung melalui peningkatan kualitas tenaga kerja (Futunanembun et al., 2023).

Kesehatan terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil analisis regresi, variabel pengeluaran Kesehatan menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia pada periode 2005-2024. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien sebesar 0,657895, yang berarti bahwa setiap kenaikan pengeluaran kesehatan sebesar 1% justru diikuti dengan peningkatan kemiskinan sebesar 0,066%. Nilai t-statistik sebesar 2,392 dan probabilitas sebesar 0,029 ($< 0,05$) mengindikasikan bahwa pengaruh ini signifikan secara statistik. Secara teoritis, hasil ini tampak bertentangan dengan pandangan umum bahwa investasi di sektor kesehatan seharusnya dapat mengurangi kemiskinan.

Pengeluaran yang tinggi tidak selalu berarti efektif jika tidak dialokasikan dengan tepat. Contohnya, jika sebagian besar anggaran digunakan untuk biaya operasional atau pembangunan fasilitas kesehatan di area perkotaan, maka masyarakat yang berada di daerah terpencil masih bisa menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Di samping itu, biaya pengobatan yang tinggi dan ketidakmerataan dalam cakupan jaminan kesehatan bisa mengakibatkan masyarakat miskin harus mengeluarkan biaya pribadi yang besar, yang pada gilirannya memperburuk situasi ekonomi mereka. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa tingginya pengeluaran di bidang kesehatan justru dapat memaksa rumah tangga untuk terjerumus ke dalam kemiskinan, terutama jika tidak didukung oleh sistem perlindungan kesehatan yang memadai (Biltagy & Hamdi, 2024). Selain itu, laporan dari WHO dan Bank Dunia juga menekankan bahwa lebih dari 2 miliar orang menghadapi tekanan finansial akibat tingginya biaya layanan kesehatan, dan banyak dari mereka terpaksa jatuh ke dalam kemiskinan karena tidak mampu menanggung biaya medis (World Health Organization, 2023). Oleh karena itu, meskipun secara teori alokasi dana kesehatan seharusnya bermanfaat dalam mengurangi kemiskinan, dalam konteks Indonesia, efek positif dan signifikan terhadap kemiskinan yang diidentifikasi dalam penelitian ini kemungkinan besar mencerminkan adanya kelemahan dalam efisiensi, distribusi, dan ketepatan penggunaan anggaran kesehatan.

Kesimpulan

Penelitian ini membuktikan bahwa pengeluaran pemerintah sektor publik memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia selama periode 2005–2024. Melalui analisis regresi linear berganda, ditemukan bahwa pengeluaran infrastruktur dan pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Koefisien pengeluaran infrastruktur sebesar -1,901658 dan pendidikan sebesar -3,660512, masing-masing dengan nilai *p-value* 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja di kedua sektor tersebut mampu menurunkan angka kemiskinan secara nyata. Sebaliknya, pengeluaran kesehatan menunjukkan koefisien positif sebesar 0,657895 dengan *p-value* 0,029, mengindikasikan bahwa alokasi anggaran kesehatan justru berkorelasi dengan peningkatan kemiskinan. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai *Adjusted R²* sebesar 0,956, yang berarti bahwa 95,6% variasi dalam tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh pengeluaran infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan secara simultan. Hasil ini mengonfirmasi tujuan dan rumusan masalah dalam penelitian, yakni untuk menguji sejauh mana pengeluaran sektor publik dapat menurunkan angka kemiskinan. Implikasi kebijakan dari temuan ini adalah perlunya optimalisasi alokasi anggaran infrastruktur dan pendidikan dalam strategi penanggulangan kemiskinan. Sementara itu, anggaran kesehatan perlu ditinjau ulang agar distribusinya lebih merata dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat miskin, terutama di wilayah terpencil.

Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal cakupan data yang bersifat agregat nasional dan belum mempertimbangkan perbedaan kondisi antar wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan data panel atau spasial antar provinsi untuk melihat disparitas regional. Selain itu, memasukkan variabel lain seperti ketimpangan sosial, efektivitas program bantuan sosial, atau indikator ekonomi makro lainnya dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan.

Acknowledgment

-

Daftar Pustaka

- Alam, A. Z. I., Zaid, M., & Alam, A. A. F. (2023). Digitalisasi Sistem Perlindungan Sosial Kebijakan di Indonesia sebagai Langkah Menuju Masyarakat 5.0 . *Journal Social Society*, 3(2), 95–112. <https://doi.org/10.54065/jss.3.2.2023.335>
- Aminah, S. (2016). Analisis Pengaruh Investasi Swasta dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 4(2), 119-130. <https://doi.org/10.22437/ppd.v4i2.3587>
- Andina, W., & Wahyudi, A. (2024). Upaya Pengentasan Kemiskinan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 9(01), 69-80. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i01.1066>
- Arifin, J. (2020). Budaya kemiskinan dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. *Sosio Informa*, 6(2), 114-132. <https://doi.org/10.33007/inf.v6i2.2372>
- Azmi, R. M. T., & Panjawa, J. L. (2022). Pengaruh pengeluaran pemerintah, pertumbuhan

- ekonomi dan pengangguran terhadap kemiskinan. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2(6), 127-140. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i6.277>
- Biltagy, M., & Hamdi, M. (2024). Public health expenditure and household poverty: case study of Egypt. *Future Business Journal*, 10(1), 7.
- Farida, V. N., & Widodo, W. (2024). Pengaruh Produktivitas Pertanian terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia 2015-2020. *Fokus Bisnis Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, 23(1), 17-27. <https://doi.org/10.32639/fokbis.v23i1.846>
- Fithri, N., & Kaluge, D. (2017). Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap kemiskinan di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2), 129-136. <https://doi.org/10.22219/jep.v15i2.5360>
- Futunanembun, B. A., Rorong, I. P. F., & Siwu, H. F. D. (2023). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Kemiskinan di Provinsi Papua Barat. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(7), 217-228.
- Khairunnisa, R., Imansyah, M. H., & Rahayu, D. (2021). Dampak Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, Dan Infrastruktur. *Syntax Idea*, 3(12), 2748-2757. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i12.1678>
- Komang, E. M., & Sudemen, I. W. (2025). Pola Intervensi Pemerintah melalui Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, 9(1), 68-77. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v9i1.92280>
- Mahendra, A. (2020). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan, Inflasi Dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 174-186. <https://doi.org/10.54367/jmb.v20i2.1010>
- Mallek, R. S., Awad, A., Ozturk, I., & ben Douissa, I. (2024). Infrastructure development and poverty eradication in sub-Saharan Africa; Its effect and transmission channels. *Cities*, 144, 104658. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2023.104658>
- Ningrum, J. W., Khairunnisa, A. H., & Huda, N. (2020). Pengaruh kemiskinan, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia tahun 2014-2018 dalam perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 212-222. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1034>
- Palenewen, T. O., Walewangko, E. N., & Sumual, J. I. (2018). Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan terhadap IPM dan dampaknya terhadap kemiskinan di sulawesi utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(4).
- Pratama, N. R. N. S., & Utama, M. S. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 8(7), 651-680.
- Rachman, A. M. (2024). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan di Indonesia. *Bulletin of Community Engagement*, 4(1), 277-288. <https://doi.org/10.51278/bce.v4i1.1266>

- Rizal, D. A., & Purnairawan, R. E. (2024). Analisis kebijakan pengentasan kemiskinan di era pemerintahan Joko Widodo. *Journal of Social Movements*, 1(1), 24-40.
- Safitri, M. I. D., Ananda, C. F., & Prasetyia, F. (2021). Analisis dampak belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif Jawa Timur. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 6(2), 85-96. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i2.339>
- Saputri, M. A., Millah, M. N., Falah, R. N., & Dewi, S. A. (2025). Poverty Alleviation Strategy: Challenges and Opportunities in Realizing SDGs in Indonesia. *Entita: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu sosial*, 523-538. <https://doi.org/10.19105/ejpis.v1i.19213>
- Sidabutar, S., Purba, E., & Panjaitan, P. D. (2020). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kemiskinan Terhadap IPM Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ekuilnomi*, 2(2), 86-101. <https://doi.org/10.36985/bkn96b53>
- Simarmata, Y. W., & Iskandar, D. D. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Jumlah Penduduk, Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia: Analisa Two Stage Least Square Untuk Kasus Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 5(1), 78-94. <https://doi.org/10.14710/jdep.5.1.78-94>
- Sirait, J. F., Ferayanti, F., & Qudraty, M. F. (2022). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Perlindungan Sosial dan Kesehatan terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 7(4), 235-244. <https://doi.org/10.24815/jimekp.v7i4.23617>
- Wahyuningrum, P. S., & Juliprijanto, W. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Publik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2(6), 189-204. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i6.270>
- World Health Organization. (2023). *Tracking universal health coverage: 2023 global monitoring report*. World Health Organization.